

**ANALISIS PENDAPATAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN
DESA (LPHD) DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI



**AWALUDDIN
105951105719**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

**ANALISIS PENDAPATAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN
DESA (LPHD) DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU**

AWALUDDIN

105951105719

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan Strata Satu (S1)

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)

Nama : Awaluddin

Nim : 105951105719

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Makassar, Agustus 2023

Telah diperiksa dan disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
NIDN : 0907028202

Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM.
NIDN : 0920018801

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.
NIDN. 0926036803

Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN. 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)

Nama : Awaluddin

Nim : 105951105719

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Pembimbing I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
NIDN. 0907028202

(.....)

Pembimbing II

Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM.
NIDN. 0920018801

(.....)

Penguji I

Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN. 0011077101

(.....)

Penguji II

Andi Aziz Abdullah, S.Hut., M.P.
NIDN. 0930106701

(.....)

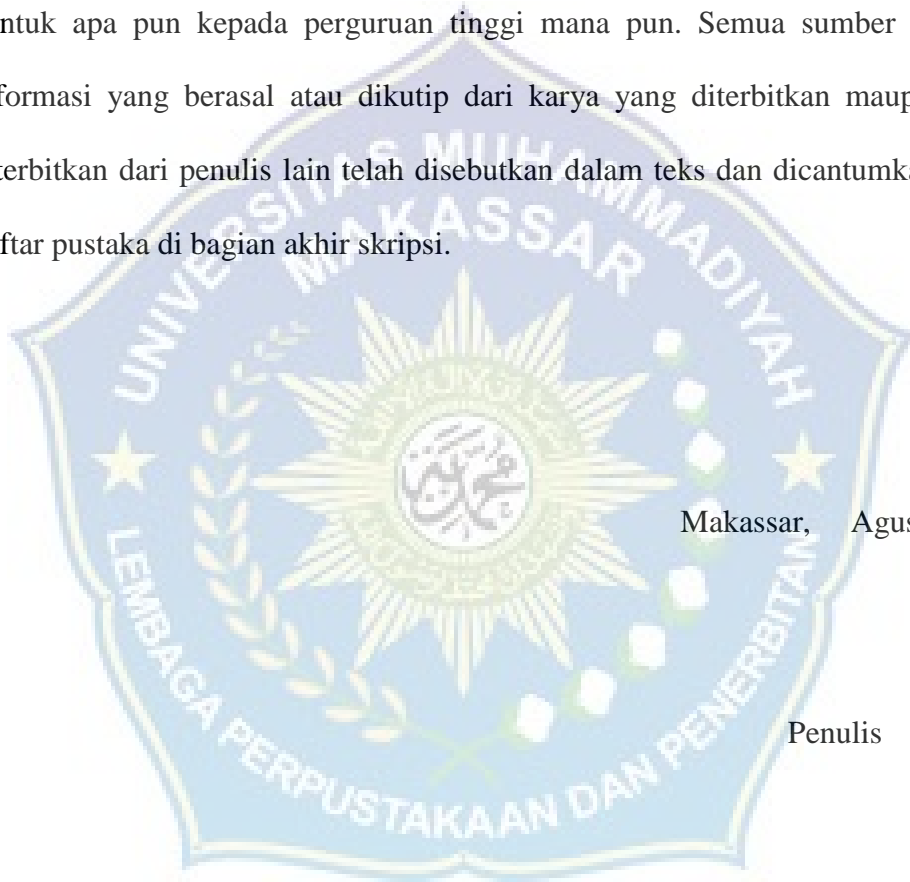
Tanggal Lulus : 29 Agustus 2023

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER DATA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi.



Makassar, Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

AWALUDDIN (105951105719), Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Di bawa Bimbingan **Hasanuddin Molo** Dan **Muthmainnah**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023. Metode pengumpulan data dipilih dengan cara *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa total pendapatan dari hasil pengelolaan kemiri sebesar Rp. 49.374.000/tahun, dengan rata-rata Rp. 3.526.714/tahun setiap responden, dan total pendapatan dari hasil pengelolaan madu trigona sebesar Rp. 23.365.000/tahun dengan rata-rata Rp. 1.557.667/tahun setiap responden. Maka dapat disimpulkan bahwa total pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari kemiri dan madu trigona yaitu sebesar Rp. 72.739.000/tahun dengan rata-rata Rp. 4.849.267/tahun setiap responden.

Kata kunci : *Analisis Pendapatan, Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa, Pendapatan Kemiri, Pendapatan Madu Trigona*



ABSTRACT

AWALUDDIN (105951105719), *Income Analysis of the Village Forest Management Institution (LPHD) of Kamiri Village, Balusu District, Barru Regency, Under the Guidance of Hasanuddin Molo and Muthmainnah.*

This study aims to determine the income of the people of the Village Forest Management Institution (LPHD) in Kamiri Village, Balusu District, Barru Regency. This research was conducted from June 18 2023 to August 18 2023. The data collection method was chosen by purposive sampling with a total of 15 respondents. Based on the research results, it shows that the total income from candlenut management is Rp. 49,374,000/year, with an average of Rp. 3,526,714/year for each respondent, and the total income from managing trigona honey is Rp. 23,365,000/year with an average of Rp. 1,557,667/year for each respondent. So it can be concluded that the total income of the Village Forest Management Institution (LPHD) from candlenuts and trigona honey is Rp. 72,739,000/year with an average of Rp. 4,849,267/year for each respondent.

Keywords: *Income Analysis, Village Forest, Village Forest Management Institution, Candlenut Income, Trigona Honey Income*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)” dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran atau kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi penulis kedepannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada

1. Kedua orang tua tercinta, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberhasilan dan keselamatan penulis dunia akhirat, kemudian dukungan moral serta materi demi keberhasilan pendidikan penulis.
2. Ibu Dr. Ir Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan masukan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ir Hasanuddin Molo, S. Hut.,M. P. IPM. CEIA Selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan terhadap penyusunan serta pengetahuan dan motivasinya.
4. Ibu Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM Selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan terhadap penyusunan serta pengetahuan dan motivasinya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu selama di bangku kuliah.
7. Bapak dan ibu UPT KPHL Unit II Ajatappareng yang memberikan bantuan dan pengetahuan baik langsung maupun tak langsung.
8. Teman-teman dan semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang besar.



Makassar, Agustus 2023

Awaluddin

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN KOMISI PENGUJI | iv |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 3 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| 2.1 Perhutanan Sosial..... | 4 |
| 2.2 Hutan Desa..... | 5 |
| 2.3 Pendapatan | 8 |
| 2.4 Kerangka Fikir | 11 |
| III. METODE PENELITIAN | 12 |
| 3.1 Waktu Dan Tempat | 12 |
| 3.2 Alat dan Bahan..... | 12 |
| 3.3 Jenis Data | 12 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 13 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 3.4.1 Wawancara..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4.2 Observasi..... | 13 |
| 3.4.3 Kuisisioner..... | 13 |
| 3.6 Analisis Data..... | 14 |
| IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 16 |
| 4.1 Letak dan Luas..... | 16 |
| 4.2 Iklim..... | 16 |
| 4.3 Keadaan Topografi..... | 17 |
| 4.4 Jumlah Penduduk..... | 17 |
| 4.5 Sarana dan Prasarana..... | 18 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 19 |
| 5.1 Identitas Responden..... | 19 |
| 5.1.1 Umur Responden..... | 19 |
| 5.1.2 Tingkat Pendidikan..... | 20 |
| 5.1.3 Luas Lahan..... | 20 |
| 5.2 Analisis Pendapatan Kemiri Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) . | 21 |
| 5.3 Analisis Pendapatan Madu Trigona Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 23 |
| 5.4 Analisis Pendapatan Kemiri dan Madu Trigona Pengelola LPHD Kamiri. | 24 |
| VI. PENUTUP..... | 27 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 27 |
| 6.2 Saran..... | 27 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 28 |
| LAMPIRAN..... | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Teks | Hal |
|----|-----------------------------|-----|
| 1. | Kerangka Fikir | 11 |
| 2. | Peta Hutan Desa Kamiri..... | 12 |



DAFTAR TABEL

| No | Teks | Hal |
|-----|--|-----|
| 1. | Topografi Desa Kamiri | 17 |
| 2. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... | 17 |
| 3. | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan..... | 18 |
| 4. | Umur Responden..... | 19 |
| 5. | Tingkat Pendidikan Responden..... | 20 |
| 6. | Luas Lahan Responden | 21 |
| 7. | Pendapatan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri..... | 22 |
| 8. | Pendapatan Masyarakat Pengelola Madu Trigona di LPHD Kamiri..... | 23 |
| 9. | Total Pendapatan Kemiri dan Trigona | 25 |
| 10. | Riwayat Hidup | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Teks | Hal |
|----|--------------------------------------|-----|
| 1. | Kuisisioner Penelitian | 32 |
| 2. | Tabulasi Data Hasil Penelitian | 35 |
| 3. | Dokumentasi Penelitian | 42 |
| 4. | SK LPHD Kamiri | 47 |
| 5. | Surat Izin Penelitian | 57 |
| 6. | Surat Keterangan Bebas Plagiat | 68 |



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat dalam pengaturan hutan secara kooperatif melalui perhutanan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa skema berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan. Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam rangka mengelola hutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. P.83/Menhut-II/2016 menjadi dasar hukum pelaksanaan perhutanan sosial. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.9/Menhut-II/2021 tentang hutan desa merupakan salah satu kebijakan Departemen Kehutanan yang mengatur sistem tenure formal masyarakat mengelola sumberdaya hutan (Apriandana et al., 2021).

Hutan desa sebagaimana disebutkan di dalam Permenhut Hutan Desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. untuk penyelenggaraannya dengan

memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Khalid, 2021).

Menurut Abidin et al. (2016), tujuan dari hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal ini hutan desa, berperan serta dalam penyelenggaraan, hutan desa memiliki Pelaksanaan kegiatan Hutan Desa terdapat lembaga di dalamnya, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) merupakan wadah dalam kegiatan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Apriandana et al., 2021).

Kesatuan pengelolaan hutan Lindung (KPHL) Ajatappareng merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) unit II Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan KPHL Ajatappareng ditetapkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017, tanggal 28 November 2017 tentang penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas ± 69.848 Ha. Salah satu program perhutanan sosial KPH Ajatappareng yaitu Hutan Desa Kamiri. Hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kamiri seluas ± 40 Ha pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Adapun sumber pendapatan masyarakat yang mengelola LPHD Kamiri yaitu kemiri dan madu trigona. Berdasarkan uraian tersebut, LPHD Kamiri banyak berpartisipasi terhadap

kegiatan pengelolaan hutan desa, yaitu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti kemiri dan lebah madu trigona. oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pendapatan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi tentang pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat, instansi yang terkait tentang pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Perhutanan Sosial dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan untuk mitigasi peningkatan deforestasi dan degradasi hutan serta mengatasi dampak negatif dari aktivitas masyarakat lokal di hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam melakukan pengelolaan hutan (Kumar 2015). Keterbatasan akses lahan masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab deforestasi. Permasalahan ini mendorong munculnya konsep perhutanan sosial (Laksemi et al., 2019).

Sejak perhutanan sosial ditetapkan menjadi program nasional dari tahun 2014 kebijakan ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari banyak kalangan terutama dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain. Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis dibidang kehutanan yaitu sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada

masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Supriyanto, H., Roni, J. dan Bayu S., 2017).

Sebagian besar areal untuk pengembangan program perhutanan sosial berada di hutan lindung (Suharti et al., 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa hak akses masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan terbatas pada komoditas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Penentuan jenis komoditas yang akan dikembangkan harus memperhatikan potensi wilayah karena setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda serta potensi dan kekhasan yang berbeda pula (Faharuddin, 2012). Keberhasilan dari program perhutanan sosial akan menjadi satu kontribusi yang besar pada program penanggulangan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan (Dewi, 2018).

2.2 Hutan Desa

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae, 2010).

Hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Hutan desa memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Hutan desa juga dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi serta budaya masyarakat. Konsep hutan desa lebih kepada pemberian akses dan hak kelola hutan kepada lembaga desa yang dianggap sebagai pemerintahan terkecil (Guncoro et al., 2021).

Hutan desa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1. Aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat. 2. Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa. 3. Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar hutan, agar ikut memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut (Nurhaedah & Hapsari, 2014).

Menurut Alif dan Supratman (2010) pembangunan hutan desa dapat memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam penguasaan sumberdaya alam.

Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Hutan Desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, izin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan (Alkhoirunnisa, 2022).

Pemberian akses dituangkan dalam Permenhut No.P.9/Menhut-II/2021). Hak-hak pengelolaan dalam Hutan Desa secara permanen diberikan oleh Menteri Kehutanan/Pemerintah Daerah kepada lembaga desa dengan waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Adapun pelaksanaan diimplementasikan program hutan desa diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya bahwa: 1) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan 2) ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Hutan Desa mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya dan ekologis, Jadi pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan aspek lainnya yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini tidak dipahami baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya. Penetapan areal kerja Hutan Desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Memanfaatkan kawasan Hutan Desa baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi, masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Memanfaatkan jasa lingkungan dapat memulai kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati,

penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon (Supratman dan Sahide, 2013).

Melalui pengembangan program hutan desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan.(Abidin et al., 2016). Lembaga Pengelola Hutan Desa merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola. Keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Desa dinilai penting bagi masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan fungsi hutan yang dikelola dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan (Qurniati et al., 2017).

2.3 Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Lestari, 2021).

Menurut Muria, (2018, p. 27) pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (*normal activity*) dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, misalnya : penjualan (*sales*), penghasilan manufaktur (*fees revenues*), pendapatan bunga (*interest revenues*), pendapatan dividen (*dividen revenues*), pendapatan royalti (*royalty revenues*), dan pendapatan sewa (*ret revenues*).

Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sochib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan 6 7 menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan.

Weygandt (2011) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan adalah hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan (Anjarwati & Safri, 2022). Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan

dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalty (Pawan, 2018, p. 351).

Menurut Arianti, (2020, p. 5) didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

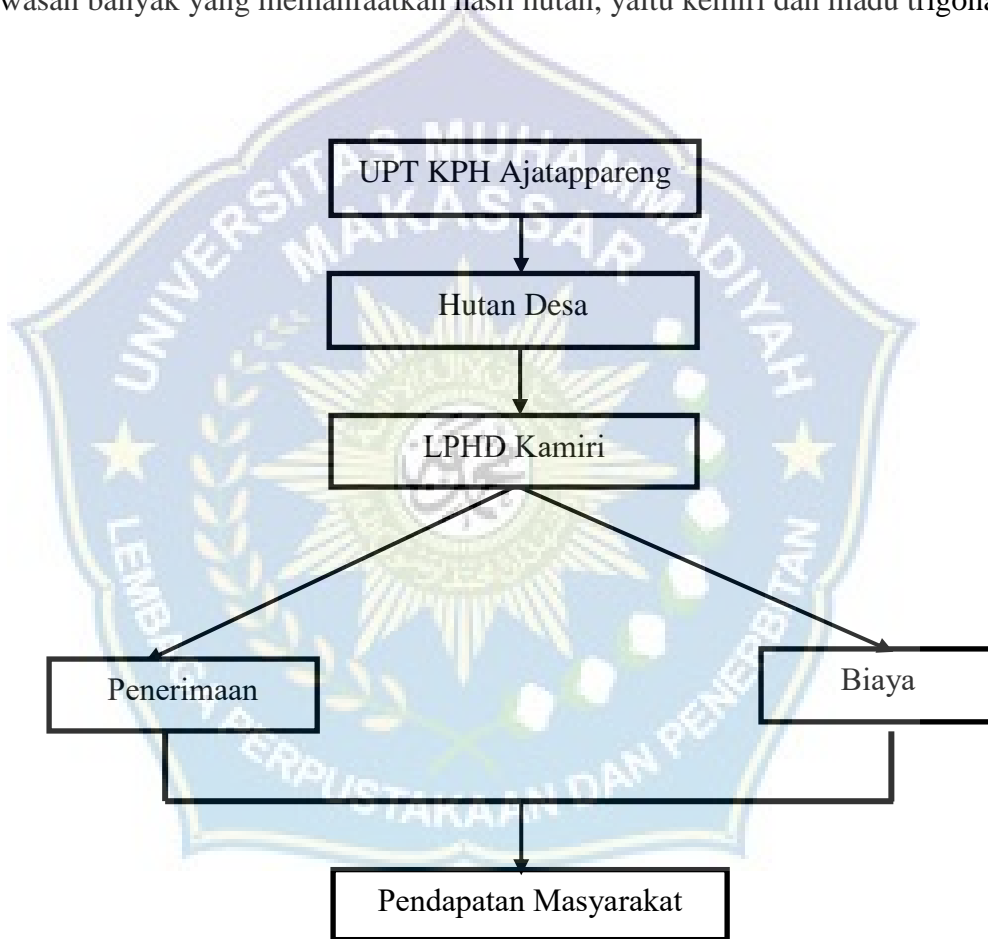
1. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
3. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lainlain suatu perusahaan.

Menurut Maulana, (2018, p. 5) pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Produk, salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.
2. Harga, jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.
3. Distribusi, perantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan ekonomi.
4. Promosi, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan.

2.4 Kerangka Fikir

Di Kabupaten Barru terdapat kawasan Hutan Desa yang terletak di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan khususnya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan karena masyarakat sekitar kawasan banyak yang memanfaatkan hasil hutan, yaitu kemiri dan madu trigona.

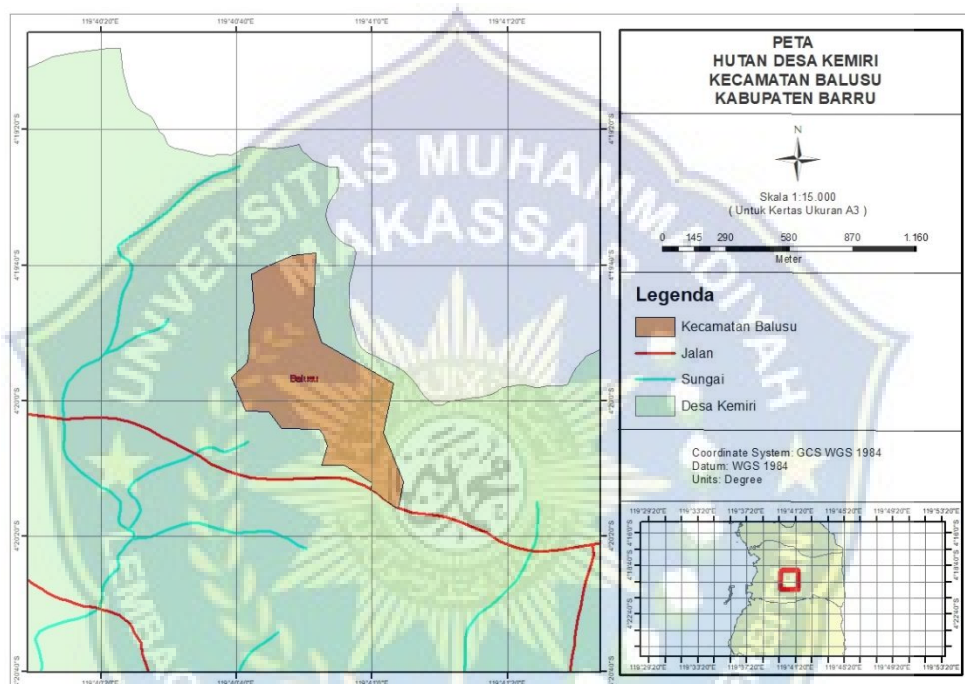


Gambar. 1 Kerangka Fikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni-Agustus 2023, di kawasan Hutan Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.



Gambar. 2 Peta Hutan Desa Kamiri

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah; alat tulis, kalkulator, laptop, kuisioner dan kamera.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut meliputi;

1. Data Primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuisioner masing–masing responden untuk mengetahui pendapatan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

2. Data Sekunder, yang diperoleh dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) berupa data luas lahan yang di kelola setiap anggota LPHD Desa Kamiri.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua masyarakat yang terdapat di Desa Kamiri. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* yaitu anggota kelompok tani yang terlibat dalam LPHD Desa Kamiri dengan jumlah sebanyak 15 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang responden secara langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari responden. Wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun data yang akan diungkapkan dalam metode wawancara ini tentunya data yang bersifat valid terhadap penelitian.

3.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

3.4.3 Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang harus di jawab responden.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis kuantitatif, merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan penghitungan pendapatan masyarakat pengelola LPHD dengan menggunakan rumus:

a. Penerimaan

$$\mathbf{TR = P \times Q}$$

Keterangan :

TR : Total Revenue {penerimaan total (Rp)}

P : Price (harga)

Q : Quantity (Jumlah barang)

b. Biaya

$$\mathbf{TC = FC + VC}$$

Keterangan :

TC : Biaya Total

FC : Biaya Tetap

VC : Biaya Variabel

c. Pendapatan

$$I = TR - TC$$

Keterangan :

I : Income (pendapatan)

TR : Total Penerimaan

TC : Biaya Total



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas

Desa Kamiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balusu, terletak di dataran tinggi (pegunungan) berbatasan dengan beberapa Desa lain di Kecamatan Balusu. Desa Kamiri terbagi menjadi empat 4 Dusun yakni Dusun Baera, Dusun Tanru Tedong, Dusun Rumpiah, Dan Dusun Kamiri.

Luas wilayah Desa Kamiri sebesar 54,72 km². Adapun batas wilayah Desa Kamiri antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balusu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Binuang atau Desa Galung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Takkalasi

4.2 Iklim

Tipe iklim dengan metode *Zone Agroklimatologi* yang berdasarkan pada bulan basah (curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 persen wilayah (84,340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober – Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April – September) (BPS Kabupaten Barru, 2021).

4.3 Keadaan Topografi

Tingkat topografi pada Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru antara datar sampai curam, tingkat topografinya 8% - 45% dengan ketinggian dari permukaan laut antara ± 25 m – 1.500 m. Topografi wilayah Desa Kamiri didominasi oleh topografi curam sebesar 42,92%.

Tabel. 1 Topografi Desa Kamiri

| No. | Kelas Lereng | Kelerengan | Luas (Ha) | Persentasi (%) |
|--------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Datar | 0 – 8 | 408,88 | 7,47 |
| 2 | Landai | 8 – 15 | 646,14 | 11,81 |
| 3 | Agak Curam | 5 - 25 | 1.305,62 | 23,86 |
| 4 | Curam | 25 - 45 | 2.348,68 | 42,92 |
| 5 | Sangat Curam | > 45 | 762,67 | 13,94 |
| Jumlah | | | 5.472 | 100 |

Sumber: BPS Kabupaten Barru, 2022

4.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Desa Kamiri 2.649 jiwa, dengan kepala keluarga 668 dimana perempuan berjumlah 1.396 jiwa lebih banyak dari laki-laki dengan jumlah 1.253 jiwa, yang terbagi atas beberapa kelompok.

Adapun tabel distribusi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan desa seperti tabel berikut.

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No. | Desa | Jumlah Penduduk | | Total |
|--------|--------|-----------------|-----------|-------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Kamiri | 1.253 | 1.396 | 2.649 |
| Jumlah | | 1.253 | 1.396 | 2.649 |

Sumber: BPS Kabupaten Barru, 2022

4.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di kecamatan Balusu diantaranya taman kanak-kanak, sekolah dasar dan madrasah, selengkapnya dilihat pada Tabel 3.

Tabel. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru |
|--------|--------------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | TK | 3 | 60 | 10 |
| 2 | SD | 5 | 289 | 56 |
| 3 | SMP | 1 | 36 | 13 |
| 4 | SMA | - | - | - |
| Jumlah | | 9 | 385 | 79 |

Sumber: BPS Kabupaten Barru 2022

Jumlah sarana prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, terlihat pada Tabel 3 bahwa tingkat pendidikan TK yaitu 3 unit sekolah, jumlah murid 60 orang, dan jumlah guru 10 orang. Tingkat pendidikan SD derajat yaitu 5 unit Sekolah, jumlah murid 289 orang, dan jumlah guru 56 orang. Tingkat pendidikan SMP derajat yaitu 1 unit sekolah, jumlah murid 36 orang, dan jumlah guru 13 orang.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Identitas dari responden merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keadaan responden atau wilayah setempat secara keseluruhan. Identitas dari responden yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: umur, tingkat pendidikan, dan luas lahan.

5.1.1 Umur Responden

Umur adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana waktu telah berlalu sejak seseorang dilahirkan atau sejak suatu peristiwa tertentu terjadi. Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun mati (Rudimin et al., 2017).

Klasifikasi berdasarkan umur responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel. 4 Umur Responden

| No. | Umur (Tahun) | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|--------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | 21 – 30 | 1 | 6,7 |
| 2 | 31 – 40 | 5 | 33,3 |
| 3 | 41 – 50 | 1 | 6,7 |
| 4 | 51 – 60 | 6 | 40 |
| 5 | 61 – 70 | 2 | 13,3 |
| Jumlah | | 15 | 100 |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Table 4 menunjukkan persentase umur responden terbesar berada pada selang umur 51-60 tahun sebesar 40%. Persentase umur responden terkecil berada pada selang umur 21-30, dan 41-50 tahun sebesar 6,7%.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hayat dalam segala lingkungan dan situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap individu (Pristiwanti et al., 2022).

Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel. 5 Tingkat Pendidikan Responden

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | SD | 6 | 40 |
| 2 | SMP | 6 | 40 |
| 3 | SMA/Sederajat | 2 | 13,3 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 1 | 6,7 |
| Jumlah | | 15 | 100 |

Sumber : *Data Primer Setelah Diolah 2023*

Berdasarkan hasil Tabel 5 dapat dilihat Tingkat Pendidikan Responden hanya sebagian besar SD dan SMP dengan jumlah 12 orang dengan masing-masing (40%) sementara tingkat Pendidikan yang terkecil adalah perguruan tinggi dengan Jumlah 1 orang dengan persentase (6,7%) dari jumlah responden sebanyak 15 orang.

5.1.3 Luas Lahan

Luas lahan yang dikelola responden yang menjadi objek pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel. 6 Luas Lahan Responden

| No | Luas Lahan (Ha) | Jumlah Orang | Persentase (%) |
|--------|-----------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 – 3 | 15 | 100 |
| 2 | 3 – 4 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa luas lahan responden yakni 2 – 3 Ha, dengan persentase 100%. Sedangkan luas lahan 3 – 4 Ha dengan persentase 0%. Luas lahan Hutan Desa yang berbeda-beda antara petani ditambah dengan kondisi lahan yang berbeda-beda, mengakibatkan perbedaan pendapatan.

5.2 Analisis Pendapatan Kemiri Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Pendapatan masyarakat pengelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) adalah semua penerimaan dari hasil usaha kemiri di dalam kawasan Hutan Desa di kurangi dengan semua pengeluaran pada saat melakukan usaha kemiri. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat pengelola kemiri di Hutan Desa di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel. 7 Pendapatan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri

| No | Nama Responden | Penerimaan (Rp/Tahun) | Biaya (Rp /Tahun) | Pendapatan (Rp/Tahun) |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | A1 | 4.800.000 | 405.000 | 4.395.000 |
| 2 | A2 | - | - | - |
| 3 | A3 | 3.600.000 | 299.000 | 3.301.000 |
| 4 | A4 | 3.900.000 | 308.000 | 3.592.000 |
| 5 | A5 | 4.500.000 | 303.000 | 4.197.000 |
| 6 | A6 | 5.100.000 | 290.000 | 4.810.000 |
| 7 | A7 | 4.500.000 | 345.000 | 4.155.000 |
| 8 | A8 | 3.000.000 | 241.000 | 2.759.000 |
| 9 | A9 | 3.600.000 | 355.000 | 3.245.000 |
| 10 | A10 | 3.900.000 | 345.000 | 3.555.000 |
| 11 | A11 | 4.800.000 | 305.000 | 4.495.000 |
| 12 | A12 | 2.400.000 | 245.000 | 2.155.000 |
| 13 | A13 | 3.000.000 | 290.000 | 2.710.000 |
| 14 | A14 | 3.600.000 | 355.000 | 3.245.000 |
| 15 | A15 | 3.000.000 | 240.000 | 2.760.000 |
| Jumlah | | 53.700.000 | 4.326.000 | 49.374.000 |
| Rata – Rata | | 3.835.714 | 309.000 | 3.526.714 |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa total penerimaan masyarakat pengelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang mengelola kemiri sebanyak Rp.53.700.000/tahun, dengan rata- rata penerimaan Rp. 3.835.714/tahun, dikurangi dengan pengeluaran yang di keluarkan oleh masyarakat yang mengelola kemiri sebanyak Rp 4.326.000/tahun dengan rata-rata pengeluaran Rp. 309.000, Jadi total

pendapatan masyarakat pengelola kemiri sebesar Rp. 49.374.000/tahun dengan rata-rata pendapatan sebanyak Rp. 3.526.714/tahun.

5.3 Analisis Pendapatan Madu Trigona Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Pendapatan masyarakat pengelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) adalah semua penerimaan dari hasil usaha madu trigona di dalam kawasan Hutan Desa di kurangi dengan semua pengeluaran pada saat melakukan usaha madu trigona. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat pengelola madu trigona di Hutan Desa di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dapat di lihat pada Tabel 8.

Tabel. 8 Pendapatan Masyarakat Pengelola Madu Trigona di LPHD Kamiri

| No | Nama Responden | Penerimaan (Rp/Tahun) | Biaya (Rp /Tahun) | Pendapatan (Rp/Tahun) |
|----|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | A1 | 2.400.000 | 305.000 | 2.095.000 |
| 2 | A2 | 2.160.000 | 280.000 | 1.880.000 |
| 3 | A3 | 1.800.000 | 235.000 | 1.565.000 |
| 4 | A4 | 2.400.000 | 325.000 | 2.075.000 |
| 5 | A5 | 1.680.000 | 425.000 | 1.255.000 |
| 6 | A6 | 2.040.000 | 240.000 | 1.800.000 |
| 7 | A7 | 1.800.000 | 235.000 | 1.565.000 |
| 8 | A8 | 1.440.000 | 230.000 | 1.210.000 |
| 9 | A9 | 1.800.000 | 330.000 | 1.470.000 |
| 10 | A10 | 2.400.000 | 330.000 | 2.070.000 |
| 11 | A11 | 1.440.000 | 230.000 | 1.210.000 |
| 12 | A12 | 1.800.000 | 275.000 | 1.525.000 |
| 13 | A13 | 1.200.000 | 260.000 | 940.000 |
| 14 | A14 | 1.440.000 | 230.000 | 1.210.000 |
| 15 | A15 | 1.800.000 | 305.000 | 1.495.000 |

| No | Nama Responden | Penerimaan (Rp/Tahun) | Biaya (Rp /Tahun) | Pendapatan (Rp/Tahun) |
|----|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Jumlah | 27.600.000 | 4.235.000 | 23.365.000 |
| | Rata – Rata | 1.840.000 | 282.333 | 1.557.667 |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa penerimaan masyarakat pengelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang mengelola madu trigona sebanyak Rp. 27.600.000/tahun, dengan rata-rata penerimaan Rp. 1.840.000/tahun, dikurangi dengan pengeluaran yang di keluarkan oleh masyarakat pengelola madu trigona sebanyak Rp 4.235.000/tahun, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 282.333/tahun, Jadi total pendapatan masyarakat pengelola madu trigona sebesar Rp 23.365.000/tahun dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.557.667/tahun.

5.4 Analisis Pendapatan Kemiri dan Madu Trigona Pengelola LPHD Kamiri

Analisis total pendapatan adalah seluruh pendapatan yang didapatkan dari usaha pengelolaan kemiri dijumlah dengan seluruh pendapatan dari usaha madu trigona. Untuk mengetahui total pendapatan masyarakat pengelola kemiri dan madu trigona di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kamiri di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel. 9 Total Pendapatan Kemiri dan Trigona

| No | Nama Responden | Pendapatan Kemiri (Rp/Tahun) | Pendapatan Madu Trigona (Rp/Tahun) | Pendapatan Total (Rp/Tahun) |
|-------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | A1 | 4.395.000 | 2.095.000 | 6.490.000 |
| 2 | A2 | - | 1.880.000 | 1.880.000 |
| 3 | A3 | 3.301.000 | 1.565.000 | 4.866.000 |
| 4 | A4 | 3.592.000 | 2.075.000 | 5.667.000 |
| 5 | A5 | 4.197.000 | 1.255.000 | 5.452.000 |
| 6 | A6 | 4.810.000 | 1.800.000 | 6.610.000 |
| 7 | A7 | 4.155.000 | 1.565.000 | 5.720.000 |
| 8 | A8 | 2.759.000 | 1.210.000 | 3.969.000 |
| 9 | A9 | 3.245.000 | 1.470.000 | 4.715.000 |
| 10 | A10 | 3.555.000 | 2.070.000 | 5.625.000 |
| 11 | A11 | 4.495.000 | 1.210.000 | 5.705.000 |
| 12 | A12 | 2.155.000 | 1.525.000 | 3.680.000 |
| 13 | A13 | 2.710.000 | 940.000 | 3.650.000 |
| 14 | A14 | 3.245.000 | 1.210.000 | 4.455.000 |
| 15 | A15 | 2.760.000 | 1.495.000 | 4.255.000 |
| Jumlah | | 49.374.000 | 23.365.000 | 72.739.000 |
| Rata – Rata | | 3.526.714 | 1.557.667 | 4.849.267 |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Pada Tabel 9 dari 15 responden di atas dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat pengelola Hutan Desa yang mengelola kemiri sebanyak Rp 49.374.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 3.526.714/tahun, dan pendapatan madu trigona sebanyak Rp 23.365.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.557.667/tahun. Total pendapatan dari kemiri dan madu trigona sebanyak Rp 72.739.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 4.849.267/tahun. Jadi pendapatan pengelola kemiri lebih banyak dibanding dengan pendapatan

madu trigona. Berdasarkan hasil penelitian (Rahmi, 2021), pendapatan petani kemiri di Kecamatan Bontocani di Kabupaten Bone yaitu RP. 216.337.779/tahun, dengan 30 responden dan luas lahan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian (Fitriyah et al., 2020), pendapatan masyarakat peternak lebah madu trigona yaitu rata-rata Rp. 4.685.000/tahun. Pendapatan masyarakat dapat berbeda-beda dikarenakan luas lahan yang dikelola berbeda.



VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara responden 15 orang anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), total pendapatan dari hasil pengelolaan kemiri sebesar Rp. 49.374.000/tahun, dengan rata-rata Rp. 3.526.714/tahun setiap responden, dan total pendapatan dari hasil pengelolaan madu trigona sebesar Rp. 23.365.000/tahun dengan rata-rata Rp. 1.557.667/tahun setiap responden. Total pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari kemiri dan madu trigona yaitu sebesar Rp. 72.739.000/tahun dengan rata-rata Rp. 4.849.267/tahun setiap responden.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus lebih mengintensifkan pembinaan terhadap Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, untuk meningkatkan produktifitas, dan kinerja masyarakat dalam melaksanakan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., Muin, S., & Oramahi, H. A. (2016). *Sikap Masyarakat Terhadap Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu People's Attitude Tovillage Forest Of Working Area Designation in Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu*. 4(2), 193–204.
- Alkhoirunnisa, R. (2022). *Pengelolaan hutan desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan bathin iii ulu kabupaten bungo*.
- Anjarwati, R., & Safri. (2022). Pengaruh Pendapatan dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus PT Pegadaian Bekasi Periode 2020). *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 127–136.
- Apriandana, F., Gumay Febryano, I., & Kaskoyo, H. (2021). Pengelolaan Hutan Desa Di Kph Wilayah Viii Semendo Dari Perspektif Kinerja Kelembagaan. *Jurnal Penelitian Sosial*.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.32522/ujht.v5i1.4413>.
- Arianti, B. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 13–36. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae. 2010. Laporan hasil kegiatan fasliitasi penyusunan rencana kerja hutan desa. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial (Poverty of the Community Around the Forest and the Social Forestry Program). *Info Teknis EBONI*, 15 (2), 65–77. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/buleboni/article/view/5155>.
- Faharuddin. 2012. Mengukur pencapaian penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia 2010. *Jurnal Agro Ekonomi* 30(2):145-157
- Fitriyah, A., Mujiburrahman, I., Mariani, Y., & Isyaturriyadhah, I. (2020). Analisis Pendapatan Usaha Ternak Lebah Madu (*Trigona Sp*) Di Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 4(2), 162. <https://doi.org/10.36355/jas.v4i2.427>

- Guncoro, S., Dg Massiri, S., golar, golar, Maiwa, A., anwar, anwar, & Wahid, A. (2021). Kesiapan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. *Warta Rimba : Jurnal Ilmiah Kehutanan*, 9(4), 206–215.
- Harnanto. (2019). *Dasar Dasar Akuntansi* (2nd ed.). Yogyakarta: Andi.
- Hendriksen, Eldon S. 2012. *Teori Akunting*. Ciputat – Tangerang : Interaksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia(2019). PSAK 105: Akuntansi Mudharabah. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>. Jakarta
- Khalid, I. (2021). *Disusun dan diajukan oleh ISTIQAMAH KHALID M012171008*.
- Kumar, V. 2015. Social Forestry in India: Concept and Schemes. *Van Sangyan* 2(11): 18–20.
- Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & . M. (2019). Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150. <https://doi.org/10.23960/jsl27150-163>
- Lestari, I. O. I. (2021). Karakteristik Pendapatan Dan Biaya Operasional. *Jurnal Ekonomi*, 1(69), 5–24.
- Maulana, A. (2018). Analisis Pendapatan dan Beban Operasional dalam Meningkatkan Laba Operasional pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPB Nusantara). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 25–27.
- Menlhk. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–268.
- Muria, G. (2018). Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih (studi kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2012-2016). *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 19–33.
- Nurhaedah, M., & Hapsari, E. (2014). Hutan Desa Kabupaten Bantaeng Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Info Teknis EBONI*, 11(1), 27–36. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/buleboni/article/view/5030>.
- Pawan, E. C. (2018). Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan Psak No.23 Pada Pt. Pegadaian (Persero). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 349–356.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1707–1715.

- Qurniati, R., Duryat, & Kaskoyo, H. (2017). Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa Lampung. *Jurnal Sakai Sambayan*, 1(3), 80–86.
- Rahmi, M. (2021). Pemanfaatan Dan Kontribusi Kemiri (*Aleurites Moluccana*) Sebagai Komoditi Hhbk Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Perennial*, 17(1), 26–34. <http://dx.doi.org/10.24259/perennial.v17i1.13087>
- Rudimin, Hariyanto, T., & Rahayu, W. (2017). Hubungan Tingkat Umur dengan Kualitas Tidur pada Lansia di Posyandu Permadi Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2(1), 119–127.
- Sochib. (2018). Pengantar Akuntansi 1 (pertama). Yogyakarta: Deepublish
- Suharti, S., K.L. Ginoga, Murniati, D. Octavia, A. Windyoningrum. 2017. Langkah strategis menuju percepatan realisasi capaian program perhutanan sosial. Policy Brief 11 (08) 2017. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim.
- Supratman dan Alif. 2010. Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng. Konsep, Proses dan Refleksi. Regional Community Forestry Training Center for Asia and The Pacifik. CV.Bumi Bulat Bundar.



Lampiran. 1 Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

ANALISIS PENDAPATAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN

DESA (LPHD) DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU

KABUPATEN BARRU

1. Data Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur Responden :
4. Jenis Kelamin L/P :
5. Status Dalam Keluarga :
6. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Perguruan Tinggi



Kuisisioner Responden

1. Berapa luas lahan yang dikelola?

Jawab :.....

2. Apa saja produk yang dihasilkan?

Jawab :.....

3. Berapa produksi setiap tanaman yang dihasilkan?

Jawab :.....

4. Berapa harga setiap produksi yang dihasilkan per / kg?

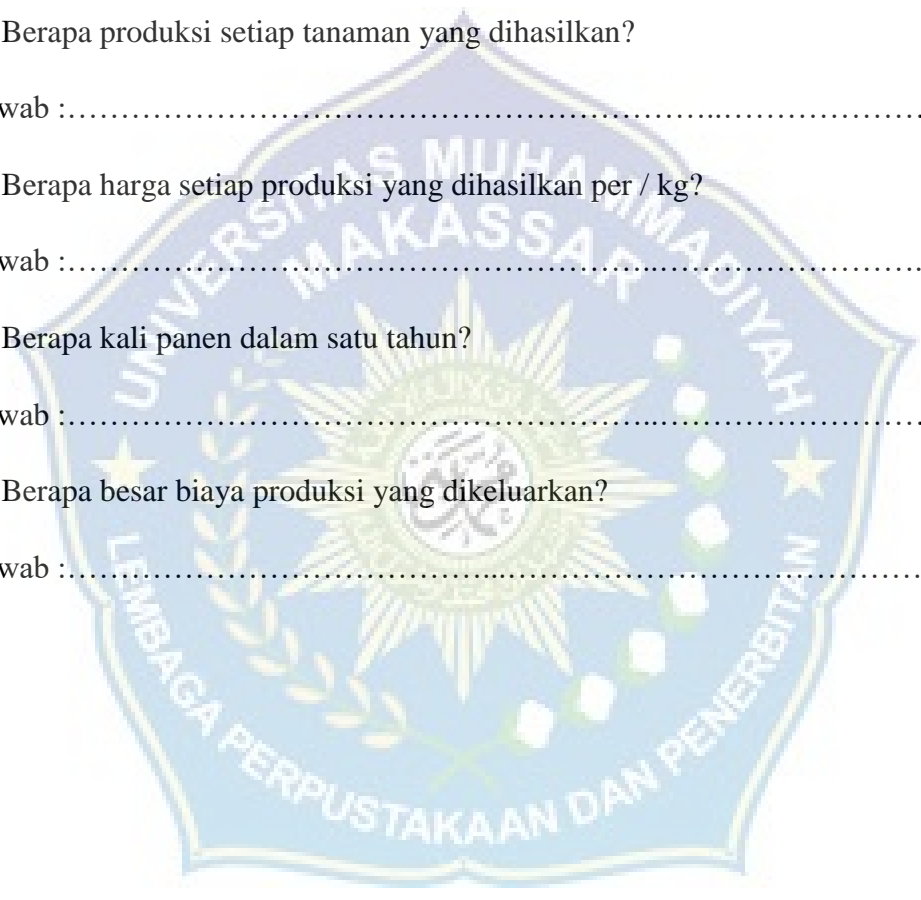
Jawab :.....

5. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawab :.....

6. Berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan?

Jawab :.....



| No. | Luas Lahan | Jenis Produk | Biaya | Jumlah |
|-----|------------|--------------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |



Lampiran. 2 Tabulasi Data Hasil Penelitian

Tabel. 10 Data Identitas Responden Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kamiri

| No | Nama | Luas Lahan (Ha) | Umur | Pendidikan Terakhir | Jenis Kelamin | Jenis Produk |
|----|---------------------|-----------------|------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | Rahmansyah (A1) | 3 | 57 | SD | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 2 | Hasanah (A2) | 2 | 33 | Perguruan Tinggi | Perempuan | Madu Trigona |
| 3 | Baharuddin (A3) | 3 | 63 | SD | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 4 | M. Tahir (A4) | 3 | 62 | SD | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 5 | Darwis (A5) | 3 | 52 | SMP | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 6 | Haeruddin (A6) | 3 | 27 | SMA | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 7 | Ardi (A7) | 3 | 38 | SMA | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 8 | Jamaluddin (A8) | 2 | 54 | SMP | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 9 | Jalil (A9) | 3 | 40 | SD | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 10 | Abd. Rauf (A10) | 3 | 52 | SMP | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 11 | Abd. Wahab (A11) | 3 | 56 | SD | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 12 | Marewangeng (A12) | 2 | 38 | SMP | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 13 | Dg. Pangerang (A13) | 2 | 58 | SD | Laki - laki | Kemiri Madu Trigona |
| 14 | Usman (A14) | 3 | 40 | SMP | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |
| 15 | Amiruddin (A15) | 2 | 41 | SMP | Laki - laki | Kemiri, Madu Trigona |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Tabel. 11 Penerimaan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri

| No | Nama Responden | Jumlah Produk (Kg) | Harga Produk (Rp/Kg) | Penerimaan (Rp/Tahun) |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Rahmansyah (A1) | 160 | 30.000 | 4.800.000 |
| 2 | Hasanah (A2) | - | - | - |
| 3 | Baharuddin (A3) | 120 | 30.000 | 3.600.000 |
| 4 | M. Tahir (A4) | 130 | 30.000 | 3.900.000 |
| 5 | Darwis (A5) | 150 | 30.000 | 4.500.000 |
| 6 | Haeruddin (A6) | 170 | 30.000 | 5.100.000 |
| 7 | Ardi (A7) | 150 | 30.000 | 4.500.000 |
| 8 | Jamaluddin (A8) | 100 | 30.000 | 3.000.000 |
| 9 | Jalil (A9) | 120 | 30.000 | 3.600.000 |
| 10 | Abd. Rauf (A10) | 130 | 30.000 | 3.900.000 |
| 11 | Abd. Wahab (A11) | 160 | 30.000 | 4.800.000 |
| 12 | Marewangeng (A12) | 80 | 30.000 | 2.400.000 |
| 13 | Dg. Pangerang (A13) | 100 | 30.000 | 3.000.000 |
| 14 | Usman (A14) | 120 | 30.000 | 3.600.000 |
| 15 | Amiruddin (A15) | 100 | 30.000 | 3.000.000 |
| Jumlah | | | | 53.700.000 |
| Rata - Rata | | | | 3.835.714 |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Tabel. 12 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri

| No | Nama Responden | Alat dan Bahan | Jumlah Alat/Tahun | Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | Rahmansyah (A1) | Pengupas kemiri | 15 | 2.000 | 30.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 3 | 50.000 | 150.000 |
| | | Bakul | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 2 | Hasanah (A2) | Pengupas kemiri | - | - | - |
| | | Karung Kecil | - | - | - |
| | | Terpal | - | - | - |
| | | Bakul | - | - | - |
| 3 | Baharuddin (A3) | Pengupas kemiri | 12 | 2.000 | 24.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 4 | M. Tahir (A4) | Pengupas kemiri | 14 | 2.000 | 28.000 |
| | | Karung Kecil | 12 | 2.500 | 30.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 5 | Darwis (A5) | Pengupas kemiri | 14 | 2.000 | 28.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 6 | Haeruddin (A6) | Pengupas kemiri | 10 | 2.000 | 20.000 |
| | | Karung Kecil | 8 | 2.500 | 20.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 7 | Ardi (A7) | Pengupas kemiri | 10 | 2.000 | 20.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |

| No | Nama Responden | Alat dan Bahan | Jumlah Alat/Tahun | Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun |
|----|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Terpal | 3 | 50.000 | 150.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 8 | Jamaluddin (A8) | Pengupas kemiri | 8 | 2.000 | 16.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 9 | Jalil (A9) | Pengupas kemiri | 15 | 2.000 | 30.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 10 | Abd. Rauf (A10) | Pengupas kemiri | 10 | 2.000 | 20.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 11 | Abd. Wahab (A11) | Pengupas kemiri | 15 | 2.000 | 30.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 12 | Marewangeng (A12) | Pengupas kemiri | 10 | 2.000 | 20.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 13 | Dg. Pangerang (A13) | Pengupas kemiri | 10 | 2.000 | 20.000 |
| | | Karung Kecil | 8 | 2.500 | 20.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 14 | Usman (A14) | Pengupas kemiri | 15 | 2.000 | 30.000 |
| | | Karung Kecil | 10 | 2.500 | 25.000 |

| No | Nama Responden | Alat dan Bahan | Jumlah Alat/Tahun | Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Terpal | 3 | 50.000 | 150.000 |
| | | Bakul | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 15 | Amiruddin (A15) | Pengupas kemiri | 10 | 2.000 | 20.000 |
| | | Karung Kecil | 8 | 2.500 | 20.000 |
| | | Terpal | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Bakul | 2 | 50.000 | 100.000 |
| Total | | | | | 4.326.000 |
| Rata - Rata | | | | | 309.000 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2023



Tabel. 13 Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu Trigona Di LPHD Kamiri

| No | Nama Responden | Jumlah Produk (L) | Harga Produk (Rp /Liter) | Penerimaan (Rp/Tahun) |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Rahmansyah (A1) | 9,2 (20) | 260.870 | 2.400.000 |
| 2 | Hasanah (A2) | 8,3 (18) | 260.870 | 2.160.000 |
| 3 | Baharuddin (A3) | 6,9 (15) | 260.870 | 1.800.000 |
| 4 | M. Tahir (A4) | 9,2 (20) | 260.870 | 2.400.000 |
| 5 | Darwis (A5) | 6,4 (14) | 260.870 | 1.680.000 |
| 6 | Haeruddin (A6) | 7,8 (17) | 260.870 | 2.040.000 |
| 7 | Ardi (A7) | 6,9 (15) | 260.870 | 1.800.000 |
| 8 | Jamaluddin (A8) | 5,5 (12) | 260.870 | 1.440.000 |
| 9 | Jalil (A9) | 6,9 (15) | 260.870 | 1.800.000 |
| 10 | Abd. Rauf (A10) | 9,2 (20) | 260.870 | 2.400.000 |
| 11 | Abd. Wahab (A11) | 5,5 (12) | 260.870 | 1.440.000 |
| 12 | Marewangeng (A12) | 6,9 (15) | 260.870 | 1.800.000 |
| 13 | Dg. Pangerang (A13) | 4,6 (10) | 260.870 | 1.200.000 |
| 14 | Usman (A14) | 5,5 (12) | 260.870 | 1.440.000 |
| 15 | Amiruddin (A15) | 6,9 (15) | 260.870 | 1.800.000 |
| Jumlah | | | | 27.600.000 |
| Rata – Rata | | | | 1.840.000 |

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Tabel. 14 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Lebah Madu Trigona di LPHD Kamiri

| No | Nama Responden | Alat dan Bahan | Jumlah Alat/Tahun | Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun |
|----|-----------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | Rahmansyah (A1) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | | Papan | 4 | 45.000 | 180.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | Hasanah (A2) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | | Papan | 4 | 45.000 | 180.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | Baharuddin (A3) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | M. Tahir (A4) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | | Papan | 5 | 45.000 | 225.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | Darwis (A5) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 25 | 1.000 | 25.000 |
| | | Paku | 3 | 25.000 | 75.000 |
| | | Papan | 6 | 45.000 | 270.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Haeruddin (A6) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | Ardi (A7) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 15 | 1.000 | 15.000 |
| | | Paku | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | Jamaluddin (A8) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 15 | 1.000 | 15.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |

| No | Nama Responden | Alat dan Bahan | Jumlah Alat/Tahun | Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 9 | Jalil (A9) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 3 | 25.000 | 75.000 |
| | | Papan | 4 | 45.000 | 180.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| | | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Abd. Rauf (A10) | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | | Papan | 5 | 45.000 | 225.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 11 | Abd. Wahab (A11) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 15 | 1.000 | 15.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 12 | Marewangeng (A12) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 15 | 1.000 | 15.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | | Papan | 4 | 45.000 | 180.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 13 | Dg. Pangerang (A13) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 14 | Usman (A14) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 15 | 1.000 | 15.000 |
| | | Paku | 1 | 25.000 | 25.000 |
| | | Papan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 15 | Amiruddin (A15) | Gergaji | 1 | 30.000 | 30.000 |
| | | Botol bekas (460 ml) | 20 | 1.000 | 20.000 |
| | | Paku | 2 | 25.000 | 50.000 |
| | | Papan | 4 | 45.000 | 180.000 |
| | | Palu | 1 | 25,000 | 25,000 |
| Jumlah | | | | | 4.235.000 |
| Rata – Rata | | | | | 282.333 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2023

Lampiran. 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar. 3 Wawancara Responden



Gambar. 4 Wawancara Responden



Gambar. 4 Wawancara Responden



Gambar. 5 Pengamatan Stup Lebah Madu Trigona



Gambar. 6 Pengamatan Stup Lebah Madu Trigona



Gambar. 7 Pengamatan Stup Lebah Madu Trigona



Gambar. 8 Pengamatan Stup Lebah Madu Trigona



Gambar. 9 Proses Pengupasan Kemiri



Gambar. 10 Proses Pengeringan Kemiri



Gambar. 11 Proses Pengeringan Kemiri

Lampiran. 4 SK LPHD Kamiri



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK. 5161/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA
PENGELOLA HUTAN DESA KAMIRI SELUAS ± 40 (EMPAT PULUH) HEKTARE
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA KAMIRI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Nomor 522/78/Dishut tanggal 27 Desember 2012, Bupati Barru mengajukan usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa seluas ± 100 (Seratus) hektare di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.647/Menhut-II/2014 tanggal 23 Juli 2014, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Kamiri seluas ± 40 (Empat Puluh) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf (e), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri

Kehutanan ...

Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja HD dan HKm telah berakhir, Menteri menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa berdasarkan hasil evaluasi;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor BA.61/PKPS/PHD/PSKL.0/4/2017 tanggal 6 April 2017, areal tersebut huruf a, Areal yang direkomendasikan menjadi areal HPHD seluas ± 40 (Empat Puluh) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- e. bahwa berdasarkan Telaahan Peta Areal Kerja Nomor T.160/PKPS/PHD/PSKL.0/9/2017 tanggal 12 September 2017, areal tersebut huruf b direkomendasi seluas ± 40 (Empat Puluh) hektare berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dalam penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Sejjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Pemberian...

Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri seluas ± 40 (Empat Puluh) hektare, berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA KAMIRI SELUAS ± 40 (EMPAT PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri di wilayah administrasi Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 40 (Empat Puluh) Hektare, berada pada kawasan

Hutan...

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :

1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindah tangankan;
4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.

KEEMPAT : Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
4. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem tebang pilih.

KELIMA...

KELIMA : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri berkewajiban:

1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;

5. melakukan...

5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH : Kegiatan pemanfaatan kayu dilakukan dengan sistem silvikultur tebang pilih, dengan mengacu kepada RPHD dan RKHD yang telah disahkan.

KEDELAPAN : Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Kamiri melanggar hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEPULUH...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya Pada tanggal 4 Oktober 2017

Kepala Bagian Hukum dan

Kerjasama Teknik

Sekretariat Direktorat

Jenderal Perhutanan Sosial

dan Kemitraan Lingkungan

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si

Ttd.

HADI DARYANTO

NIP 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;
12. Gubernur Sulawesi Selatan;
13. Bupati Barru;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan Wil. Sulawesi;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII di Kab. Barru;
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN
DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA KAMIRI SELUAS ± 40
(EMPAT PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI
DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK. 5161/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017

TANGGAL : 4 Oktober 2017

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA
KAMIRI DI DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penasehat / Pelindung

1. Irwan Temma (Kepala Desa Kamiri)
2. Suwarni Jayanti (Ketua BPD)
3. Nufri (Tokoh Masyarakat)

Ketua Umum : Ardi
Sekretaris : Haeruddin
Bendahara : Nurhasanah

Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Koordinator : M. Tahir
Anggota : 1. Jamaluddin
2. Jalil
3. Abd. Rauf

Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha

Koordinator : Darwis
Anggota : 1. Abd. Wahab
2. Marewangeng
3. DG. Pangerang

Seksi Perlindungan dan Pengawasan

Koordinator : Baharuddin

Anggota...

Anggota

- : 1. Usman
2. Amiruddin
3. Rahmansyah

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002



Lampiran. 5 Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> · e-mail barrudpmtsptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 17 Juli 2023

Nomor : 392/IP/DPMPTSP/VII/2023
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Kamiri Kec. Balusu Kab.
Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20997/S.01/PTSP/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : AWALUDDIN
Nomor Pokok : 105951105719
Program Studi : Kehutanan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Tana Karaeng Desa Tana Karaeng Kec. Manuju Kab. Gowa

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 18 Juli 2023 s/d 18 Agustus 2023, dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**ANALISIS PENDAPATAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA (LPHD) DESA KAMIRI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan-Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar/copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,

H. MUSTAWIN, S.Sos, M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
ANIP 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeltbangda Kab. Barru;
3. Camat Balusu Kab. Barru;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Plagiat

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Awaluddin
Nim : 105951105719
Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 2 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 10 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 9 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 10 % | 10 % |
| 6 | Bab 6 | 3 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Agustus 2023
Mengetahui
Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan,


Nur Hafid, S.Hum., M.I.P.
N.B.M. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Awaluddin 105951105719 BAB I

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123book.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



Awaluddin 105951105719 BAB II

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper | 3% |
| 2 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper | 2% |
| 3 | repository.unmuha.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 1% |
| 5 | www.journal.unrika.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | pt.scribd.com Internet Source | 1% |
| 7 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | temukancontoh.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 9 | www.scribd.com | |

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



Awaluddin 105951105719 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



1

docplayer.info

Internet Source

6%

2

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Awaluddin 105951105719 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com
Internet Source



9%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Awaluddin 105951105719 BAB V

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| Rank | Source | Percentage |
|------|---|------------|
| 1 | journal.unhas.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | 123dok.com Internet Source | 1% |
| 3 | core.ac.uk Internet Source | 1% |
| 4 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | docplayer.info Internet Source | 1% |
| 6 | issuu.com Internet Source | 1% |
| 7 | Abyadul Fitriyah, Imam Mujiburrahman, Yuni Mariani, Isyaturriyadhah Isyaturriyadhah. "ANALISIS PENDAPATAN USAHA TERNAK LEBAH MADU (TRIGONA SP)DI DESA SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA", JAS (Jurnal Agri Sains), 2020 Publication | 1% |

| | | |
|----|---|----|
| 8 | es.scribd.com Internet Source | 1% |
| 9 | stia-asmisolo.ac.id Internet Source | 1% |
| 10 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes On Exclude matches Off
 Exclude bibliography On



Awaluddin 105951105719 BAB VI

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



3%

LULUS

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123book.com
Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Awaluddin Lahir di Maros Tanggal 28 Desember 2001.

Penulis merupakan anak kelima dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Ma'mun dan Ibunda Supiati. Penulis mengikuti pendidikan formal pada tahun 2006 di TK AISYIAH BONTOMAERO dan lulus Pada tahun 2007.

Masuk SD INPRES TANAKARAENG tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP NEGERI 05 MANUJU dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA NEGERI 18 GOWA dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Strata 1 (S1) dan lulus pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, dan pada tahun 2023 akan menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”

Pengalaman organisasi: Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Pertanian, Anggota Bidang Media dan Informasi Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HMK-FP) periode 2021-2022.